



Judul : Brin masih sulit berkomunikasi
Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 12

BRIN masih Sulit Berkolaborasi



Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Berbagai langkah yang dilakukan BRIN, pascapeleburan berbagai lembaga riset, menjadi blunder. Pemerintah perlu menata ulang badan riset superbody ini.

ATALYA PUSPA
atolya@mediacenter.com

PENELITI BRIN:
Peneliti Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan proses ekstraksi daun kelor (Moringa oleifera) untuk dijadikan biskuit dan minuman dalam meningkatkan ketersediaan zat gizi (bio availability) di Puspitek Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (17/3). Data Inovasi Global Tahun 2021 mencatat, Indonesia berada pada urutan ke 14 di Asia Tenggara dan Asia Timur, serta ke-87 di dunia, turun dua peringkat dari capaian di 2020 dalam hal inovasi dan pengembangan.

Oleh karena itu, untuk kembali meningkatkan peringkat ini serta memperkuat riset dan pengembangan, diperlukan perguruan dari berbagai sektor. Namun, bingka kini, bahkan pascapembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang memegang tugas sebagai penyelenggara bidang penelitian segala bidang yang terdiri

grasi, masih belum memperlihatkan perkembangan yang menggembira rakan terhadap ekosistem riset di Indonesia.

Selama dua tahun BRIN berjalan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Ari Fahril Syam belum melihat adanya perubahan itu untuk mengolah-rasakan riset yang ada di tingkat Nasional yang juga berjalan. Ia menilai, saat ini baik DIKTI maupun BRIN masih berjalan sendiri-sendiri.

"Meskiya keduanya saling mendukung, namun mungkin dalam koordinasinya masih ada kendala. Tapi seharusnya universitas yang sudah terjitu pelaksanaan risetnya demi kepentingan pendidikan perlu dikembangkan," ujar Ari.

Tantangan lain yang dihadapi ialah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terlambat. Menurut Edi, pengalamannya saat menempuh pendidikan master di luar negeri pada 1998, banyak negara seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa.

"Sementara ketika saya mengambil master, saya dibayai World Bank. Ok, sekarang ada IDPP, walaupun terlambat, bisa-bisa dari pemerintah ini sangat baik untuk meningkatkan SDM, khususnya dengan dosen dan peneliti," ucap dia.

Di lain pihak, Direktur Ahli dan Sistem Audit BRIN mengungkapkan kolaborasi dilakukan BRIN dengan berbagai pihak untuk mendukung riset nasional, salah satunya dengan pihak industri. Menurut dia, industri menjadi entitas strategis bagi BRIN sebagai mitra hilirisasi produk riset dan inovasi.

"Momen ini menjadi penting karena industri adalah entitas strategis sebagai agen hilirisasi pemakaian dan penggunaan hasil riset dan inovasi BRIN. Industri merupakan mitra yang akan melanjutkan proses komersialisasi dari hasil-hasil riset yang dilaksanakan oleh peneliti BRIN," papar Edi.

mentar. Ari mengusulkan perlu adanya pemberian insentif kepada perusahaan untuk turut mendukung hilirisasi produk inovasi prototipe yang dihasilkan universitas.

"Jadi pemerintah silakan memberi perhatian penting untuk mendukung pusat riset yang ada di BRIN, di sisi lain institusi pendidikan harus juga didukung," ucap dia.

Salah satu kendala yang dihadapi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset adalah pembayaan. Ari mengaku, sejak adanya penggabungan Kemendikbud-Riset, perguruan tinggi banyak menerima bantuan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Proses alih teknologi dari BRIN ke mitra industri dilakukan melalui skema lisensi yang merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan hasil-hasil riset para peneliti BRIN yang telah dicatatkan sebagai kekayaan intelektual. Melalui pencatatan hasil riset sebagai kekayaan intelektual, para peneliti akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk perlindungan hukum, peningkatan nilai komersial, perlindungan dari pesaing, insentif untuk lebih mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, serta jaminan keamanan investasi di bidang riset.

Di sisi lain, lanjut Edi, dengan memanfaatkan layanan alih teknologi melalui lisensi yang berbasis pada kekayaan intelektual.

Dengan demikian, mitra industri dapat memaksimalkan investasi risetnya dari segi waktu maupun biaya untuk penyediaan sumber daya manusia, bahan, peralatan, metodologi, juga data dan informasi.

Mitra industri juga akan mendapatkan manfaat dalam bentuk akses ke teknologi terbaru, pengurangan risiko dan biaya riset, peningkatan kecepatan dalam peluncuran produk baru maupun ekspansi pasar, serta sebagai pinto untuk menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan institusi riset lokal maupun global.

Melalui praktik sinergi dan kolaborasi BRIN dan mitra industri, regulator, maupun pemangku kepentingan, diharapkan dapat dibangun ekosistem riset dan inovasi yang mampu membangun roda perekonomian bangsa berbasis pengetahuan.

Proyek strategis

Pro dan kontra keberadaan BRIN setelah berjalan 3 tahun lebih ternyata masih saja terjadi. Seperti yang dikemukakan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, yang mendak pemerintah perlu segera membenarkan kembali badan-badan riset yang telah dilebur ke dalam BRIN.

Ia khawatir berbagai program riset strategis nasional bersama asesnya akan terhambat karena kurang terpelihara dan dimanfaatkan secara optimal.

Mulyanto juga menyungguh adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya di bawah BRIN berpotensi melanggar hukum. Salah satunya program pengurutan sistem peringatan dini bencana tsunami, dan BRIN menghentikan proyek tersebut.

Alih-alih itu, menurut BPK, BRIN melanggar PP No 93 Tahun 2019 tentang Penguruan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi serta Peringatan Dini Tsunami. Ado juga temuan di proyek pengembangan pesawat udara nirwak *ipe medium altitude long endurance* (PUNA MALL) kombatan dan pengembangan garam industri terintegrasi. Keduanya juga terhentik.

BPK menemukan BRIN tidak dapat mengelola aset negara dari lembaga-lembaga riset yang dilebur. Salah satunya pengelolaan peralatan dan mesin yang dulu dioperasikan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Secara umum BPK mengungkap 24 temuan dan 46 buah permasalahan pengelolaan anggaran dan aset di BRIN.

Hal itu, lanjut Mulyanto, semakin menegaskan bahwa konsolidasi orga nisasi, SDM, program dan anggaran, koordinasi, mekanisme kerja, hingga aset pascapeleburan BRIN masih belum sepenuhnya terbenut.

"Kehilangan para tokoh ilmu dan para peneliti yang mengadukan soal ini ke Komisi VII DPR RI sudah lumayan banyak. Lembaga riset yang superbody dan sentralistik seperti BRIN ini memang sudah diingat akan susah bergerak dan menyebabkan berbagai program unggulan riset nasional batal mandek dan terbengkalai, apalagi di tengah anggaran riset yang kecil dan terus dipangkas pemerintah," pungkasnya. (H-1)



ANTARA/HUSSAIN AL-AHMAD/KAJU